

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin pesatnya perkembangan informasi, komunikasi, dan transportasi dalam kehidupan manusia disegala bidang khususnya bidang perekonomian dan perdagangan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia membentuk kesatuan masyarakat hukum yaitu daerah otonom yang berguna untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan daerah otonom maka pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan dana yang dapat diandalkan, demi mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahannya. Pada kondisi tersebut suatu daerah dianjurkan dapat mencari sumber pendapatannya sendiri dan seminimal mungkin bergantung kepada bantuan pemerintahan (subsidi), sehingga PAD harus menjadi bagian keuangan terbesar yang mendukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber dari pendanaan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri terdiri dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai pengaruh terbesar di Kabupaten Malang adalah Pajak Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak, salah satu jenis pajak yang paling berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang diantaranya adalah Pajak parkir. Berikut saya sajikan tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang Tahun 2013-2018.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013-2018

Tahun Realisasi	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)
2013	95.921.818.997
2014	102.418.436.436
2015	117.986.246.270
2016	124.674.342.121
2017	193.014.809.679
2018	218.104.689.425

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2018. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan diatas 5.000.000.000. Tahun 2013-2014 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan paling kecil dibanding tahun-tahun lainnya yaitu sebesar 6.496.617.439. Pada tahun 2016-2017 merupakan peningkatan paling besar dari tahun-tahun lainnya yaitu sebesar 68.340.467.558.

Pajak Parkir menurut pendapat Nariana (2013:1) adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Berikut adalah tabel target dan realisasi pajak parkir Kabupaten Malang.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Parkir Kabupaten Malang (Rp)

No	Tahun	Pajak Parkir (Rupiah)	
		Target	Realisasi
1	2013	250.000.000	304.525.250
2	2014	300.000.000	425.508.050
3	2015	500.000.000	778.522.500
4	2016	600.000.000	764.045.200
5	2017	950.000.000	1.101.425.275
6	2018	950.000.000	1.072.424.470

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak parkir Kabupaten Malang pada umumnya selalu melebihi target yang ditetapkan dari tahun ke tahun, meskipun ada beberapa tahun yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Sementara itu realisasi penerimaan pajak parkir yang paling signifikan melampaui target yang ditetapkan oleh Pendapatan Asli Daerah berada pada tahun 2015 yaitu sebesar 778.522.500 dan selisih dengan target yang ditetapkan sebesar 353.014.450. Penerimaan Pajak Parkir cenderung mengalami peningkatan setiap tahun meskipun masih ada beberapa tahun yang menurun, seharusnya ini menjadi perhatian khusus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang yang merupakan instansi yang mengelola serta bertanggung jawab atas penerimaan pajak parkir.

Dasar hukum pemungutan pajak parkir menurut Novelia (2016) adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
- b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Permasalahan timbul apabila dilihat dari perkembangan Kabupaten Malang setiap tahunnya yang berpengaruh pada potensi peningkatan jumlah bangunan antara lain pusat pembelanjaan, bangunan pertokoan, rumah makan, dan usaha lainnya. Semakin banyak bangunan yang dapat menarik perhatian masyarakat, semakin banyak pula masyarakat yang berkunjung dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi yang digunakan akan membutuhkan lahan parkir. Lahan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang akan menjadi sumber utama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan yang mengelola pajak parkir adalah BPKAD Kabupaten Malang. Persentase perolehan dan laju pertumbuhan pajak parkir yang cukup tinggi memberikan indikasi betapa besarnya potensi yang ada apabila Pemerintah Daerah mengawasi dan mengefisiensikan pungutan pajak tersebut. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah pungutan atas pajak parkir tersebut sudah efektif atau belum.

Efektivitasnya pemungutan pajak menggambarkan suatu kinerja pemerintahan. Dimana kinerja menurut Bastian (2006) adalah prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu sedangkan efektifitas menurut Tamrin Simanjuntak dalam (Halim, 2004:93) adalah mengukur hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut maka efektivitas dan kontribusi pendapatan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna untuk meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul **“EFEKTIVITAS PENGENAAN PAJAK PARKIR DAN KONTRIBUSI PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR DINAS KABUPATEN MALANG”** sebagai usulan laporan tugas akhir penulis.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari studi lapangan adalah untuk mengetahui efektivitas pendapatan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang.

1.3 Manfaat Penelitian

1) Bagi Pemerintah (BPKAD Kabupaten Malang)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam hal peningkatan efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan target yang diharapkan.

2) Bagi Pribadi

Untuk mempraktekan teori-teori yang dipelajari selama berada diperkuliahan.

3) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi informasi untuk penelitian dimasa yang akan datang yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Penulis melakukan pembatasan mengenai pembahasan masalah ini, untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas dan agar tidak menyimpang dari masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup Efektivitas Pendapatan Pajak Parkir dan Kontribusi Pada Pendapatan Asli Daerah di Kantor Dinas Kabupaten Malang Tahun 2019.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam memperoleh data tersebut maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Observasi, Penulis akan melakukan pengamatan secara langsung pada BPKAD Kabupaten Malang.
- 2) Wawancara, merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung pada seorang informan pada BPKAD Kabupaten Malang.

- 3) Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subyek penelitian melalui dokumen, dengan melihat langsung arsip-arsip serta catatan-catatan yang diperoleh dari kantor BPKAD Kabupaten Malang.

